

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Aneka Tambang Tbk dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Efektif dan Transparan

Muhammad Reksa Priagung^{1*}, Bima Mulya Firmansyah², Ghuftron Suhendra³, Nasrul Noer Cahya⁴, Alfina Dwi Safitri⁵

^{1*,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia.

Corresponding Email: mrpriagung@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 15 April 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Priagung, M. R., Firmansyah, B. M., Suhendra, G., Cahya, N. N., & Safitri, A. D. (2026). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Aneka Tambang Tbk dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Efektif dan Transparan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4459-4470. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.6961>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebagai upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif, transparan, dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari Annual Report ANTAM 2024 serta referensi pendukung berupa jurnal, dokumen publikasi resmi, dan regulasi terkait tata kelola. Analisis dilakukan menggunakan empat indikator utama penilaian GCG yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, serta Kepemilikan Manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANTAM telah menerapkan prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan melalui struktur tata kelola Two-Tier Board, auditor independen, Whistleblowing System, serta komitmen keberlanjutan berbasis ESG. Namun demikian, kasus hukum yang melibatkan pegawai ANTAM dalam transaksi emas di luar mekanisme resmi mengindikasikan masih adanya celah dalam sistem pengendalian internal dan efektivitas operasional penerapan GCG pada tingkat operasional. Dengan demikian, ANTAM memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan internalisasi budaya etika agar pelaksanaan GCG tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dan konsisten dalam operasional bisnis sehari-hari.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Dewan Komisaris; Komite Audit; Transparansi; ANTAM.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) as an effort to establish effective, transparent, and integrity-based corporate governance. This research applies a descriptive qualitative approach using library research sourced from ANTAM's 2024 Annual Report and supporting literature including journals, official publications, and governance regulations. The analysis focuses on four key indicators of GCG assessment namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, and Managerial Ownership. The findings indicate that ANTAM has implemented GCG principles such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness through the Two-Tier Board system, independent audit mechanism, Whistleblowing System, and ESG-based sustainability commitments. However, the legal case involving ANTAM employees in unauthorized gold transactions reveals weaknesses in the company's internal control and operational enforcement of GCG. Therefore, ANTAM requires stronger supervision and ethical value internalization to ensure GCG implementation is not merely administrative but truly substantial and consistently embedded in daily operations.

Keyword: Good Corporate Governance; Board of Commissioners; Audit Committee; Transparency; ANTAM.

1. Pendahuluan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan komponen mendasar dalam membangun perusahaan yang berintegritas, transparan, serta memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan global. Dalam konteks perusahaan milik negara, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memegang peranan strategis dalam memastikan setiap kegiatan usaha berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sosial yang kuat. Keberadaan GCG menjadi landasan utama bagi perusahaan dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya. PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya mineral nasional secara profesional, beretika, dan berintegritas. Good Governance mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya baik di sektor publik maupun swasta (Aprinawati, 2024). Pelaksanaan prinsip GCG juga diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat yang menjadi syarat utama bagi perkembangan dunia usaha, di mana penerapan GCG yang baik akan membantu manajemen dalam mengarahkan pengendalian serta kinerja perusahaan ke arah yang lebih efektif (Maryana, 2023). Meskipun berbagai langkah perbaikan telah dijalankan, penerapan GCG di Indonesia pada umumnya masih bersifat formal dan berorientasi pada pemenuhan peraturan semata. Banyak perusahaan telah melaksanakan penilaian GCG baik secara internal maupun melalui pihak ketiga yang independen. Namun, hasil penilaian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek administratif, bukan pada pembentukan budaya organisasi yang berintegritas. Praktik GCG sering kali berhenti pada tahap pemenuhan dokumen, pedoman, dan daftar periksa tanpa diikuti internalisasi nilai-nilai tata kelola dalam perilaku manajerial. Dengan demikian, kepatuhan terhadap GCG belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam penerapan yang substansial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih memerlukan upaya serius untuk menjadikannya budaya korporasi yang melekat dan berkelanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan (Purwanto *et al.*, 2025).

Fenomena lemahnya penerapan GCG juga terlihat dari munculnya berbagai skandal yang menimpa perusahaan milik negara. Berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa peraturan dan pedoman yang baik tidak akan bermakna tanpa adanya komitmen moral serta pengawasan yang efektif. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah perkara hukum yang melibatkan pengusaha asal Surabaya, Budi Said, dengan beberapa pegawai ANTAM. Kasus yang berlangsung dari tahun 2018 hingga 2024 ini bermula dari tindakan oknum pegawai ANTAM cabang Surabaya yang menawarkan harga emas di bawah ketentuan resmi perusahaan. Tindakan ini menciptakan dugaan pelanggaran terhadap sistem pengawasan dan ketentuan tata kelola yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, ditemukan adanya pemufakatan antara Budi Said dan empat pegawai ANTAM untuk melakukan transaksi jual beli emas di luar mekanisme resmi. Transaksi dilakukan dengan skema tidak tercatat dalam sistem administrasi perusahaan, sehingga aliran logam mulia dan uang tidak dapat diawasi secara efektif. Peristiwa ini menggambarkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, yang seharusnya menjadi salah satu aspek krusial dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan (Kompas, 2024). Kasus Budi Said mencerminkan bahwa meskipun ANTAM telah memiliki kerangka dan kebijakan GCG yang formal, pelaksanaan di tingkat operasional masih menghadapi tantangan serius. Sebagai perusahaan yang telah berkomitmen terhadap lima prinsip utama GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, seharusnya setiap aktivitas perusahaan dijalankan secara terbuka dan dapat diaudit dengan baik. Namun kenyataannya, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas cabang menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran etika pegawai, serta penegakan disiplin tata kelola yang lebih ketat agar GCG tidak hanya menjadi simbol kepatuhan, tetapi juga menjadi budaya yang hidup dalam setiap proses bisnis perusahaan. Dari peristiwa tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana penerapan GCG di PT ANTAM telah berjalan secara efektif dan apakah perusahaan telah melakukan pembenahan setelah munculnya kasus tersebut.

RESEARCH ARTICLE

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana langkah-langkah perbaikan tata kelola telah dilakukan oleh ANTAM, terutama dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi di seluruh lini operasional. Penelitian ini juga berupaya mengukur efektivitas penerapan GCG dalam membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat reputasi perusahaan di mata masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan prinsip GCG secara konsisten guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep dasar GCG

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menetapkan 5 pilar prinsip yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang disempurnakan pada tahun 2006, diantaranya:

2.2 Transparency

Prinsip ini penting dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, dan dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan adanya prinsip transparansi, seluruh kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan secara objektif, profesional, dan dapat melindungi kepentingan stakeholder karena adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam data yang disajikan di dalam perusahaan ataupun dalam proses pengambilan keputusan.

2.3 Accountability

Prinsip ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja perusahaan harus dikelola dengan tepat dan terukur, hal ini berfungsi untuk melihat seberapa jauh saling keterkaitannya perusahaan dengan proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan perusahaan tersebut. Unsur yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

2.4 Responsibility

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu dan organisasi perusahaan harus mematuhi semua tugas di tempat kerja, serta aturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis mereka. Konsep ini tidak terbatas pada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh atasan dan staf mereka; itu juga mencakup tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingannya. Dengan demikian, berdasarkan gagasan ini, perusahaan harus memiliki kekuatan untuk bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan undang-undang, hukum, dan peraturan yang berlaku. Ini karena hubungan hierarki internal antara perusahaan, pemangku kepentingannya, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri.

2.5 Independence

Prinsip ini dapat digunakan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dalam lingkungan bisnisnya. Untuk mencapai hal ini, organisasi harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien, memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan atau dominasi dari pihak lain, dan mampu menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilainya.

2.6 Fairness

Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perusahaan, prinsip-prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua anggota, pemangku kepentingan, dan stakeholder lainnya dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama. Faktanya, setiap anggota organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi kepada organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dan menggunakan gagasan ini sebagai motivasi bagi setiap anggota organisasi karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi kepada organisasi. Ini akan mendorong semua orang untuk bersaing untuk membela organisasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) 2024 sebagai sumber utama yang menggambarkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2024. Data sekunder berasal dari berbagai artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang relevan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan interpretasi data. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten (*content analysis*) terhadap dokumen-dokumen tersebut, dengan menitikberatkan pada empat alat ukur *Good Corporate Governance* (GCG) berikut:

- 1) Dewan Komisaris: dianalisis berdasarkan jumlah dan proporsi komisaris independen yang berperan dalam fungsi pengawasan.
- 2) Dewan Direksi: dianalisis berdasarkan jumlah anggota, pembagian tugas, serta indikator efektivitas kerjanya dalam mengelola perusahaan.
- 3) Komite Audit: dianalisis berdasarkan jumlah anggota, latar belakang keahlian, serta keterlibatan dalam proses pengendalian internal.
- 4) Kepemilikan Manajerial: dianalisis berdasarkan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh anggota Direksi sebagai bentuk keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Keempat alat ukur tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip GCG, khususnya independensi, akuntabilitas, dan kewajaran, telah diterapkan dalam struktur tata kelola PT ANTAM (Firmansyah & Cahya, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki hubungan yang berbeda terhadap tax avoidance pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021. Secara parsial, variabel *Return on Equity* (ROE) terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi 0,005, sedangkan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan nilai signifikansi 0,067 dan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan nilai signifikansi 0,275 tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,022. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,286 menunjukkan bahwa variasi tax avoidance dapat dijelaskan oleh ROE, DAR, dan DER sebesar 28,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.1.1 Profil PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM)

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) adalah perusahaan pertambangan nasional yang didirikan pada tahun 1968. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran berbagai produk mineral seperti emas, feronikel, bijih nikel, bauksit, dan alumina. ANTAM merupakan bagian dari holding BUMN Pertambangan, yaitu MIND ID, yang mendukung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia. Dengan struktur tata kelola yang mengadopsi sistem *Two-Tier Board*, ANTAM berkomitmen menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Perusahaan ini juga menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk memastikan operasional yang efisien dan bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.



Gambar 1. Profil PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM)

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral yang didirikan pada 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968. ANTAM menjadi bagian dari Holding BUMN Pertambangan, yaitu MIND ID (Mining Industry Indonesia), bersama dengan PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Freeport Indonesia, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Sebagai anggota MIND ID, ANTAM memiliki peran strategis dalam mendukung hilirisasi mineral nasional dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Kegiatan usaha ANTAM meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran komoditas utama seperti emas, feronikel, bijih nikel, bauksit, dan alumina. Melalui unit bisnis logam mulia, ANTAM juga menjadi produsen dan pemurni emas bersertifikat yang diakui secara internasional. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan berbasis sumber daya alam dengan daya saing global yang unggul dan berkelanjutan, sedangkan misinya berfokus pada peningkatan nilai perusahaan melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Dalam penerapan tata kelola perusahaan, ANTAM mengadopsi sistem *Two-Tier Board*, yang memisahkan fungsi pengawasan dan pengelolaan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur tata kelola terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan, dan Direksi yang menjalankan fungsi manajerial. Berdasarkan *Annual Report 2024*, Dewan Komisaris ANTAM berjumlah tujuh orang dengan tiga di antaranya merupakan komisaris independen, sehingga telah memenuhi ketentuan OJK terkait proporsi minimal komisaris independen sebesar 30 persen. Sementara itu, Dewan Direksi berjumlah enam orang yang masing-masing membawahi bidang utama seperti keuangan, operasional, pengembangan bisnis, sumber daya manusia, dan manajemen risiko. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, serta Komite GCG dan CSR. Selain itu, ANTAM juga memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Fungsi Manajemen Risiko yang beroperasi secara independen, serta sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai bagian dari penguatan budaya transparansi dan integritas. Struktur tata kelola yang diterapkan mencerminkan komitmen ANTAM dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif, transparan, dan berkelanjutan di seluruh aspek operasionalnya.

4.1.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada publik mengenai kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Akuntabilitas ditegaskan melalui pembagian tugas yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengawasan yang ketat oleh Komite Audit. Prinsip tanggung jawab diimplementasikan melalui komitmen perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi

RESEARCH ARTICLE

yang berlaku. Independensi dijaga melalui keberadaan komisaris independen yang berperan dalam pengawasan, sementara prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat sekitar. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, ANTAM berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan menjaga keberlanjutan usaha.

1) Transparansi

Prinsip transparansi PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada publik mengenai seluruh aspek kegiatan usaha, baik finansial maupun nonfinansial. Berdasarkan *Annual Report 2024*, ANTAM secara konsisten menyampaikan laporan tahunan yang komprehensif mencakup kinerja keuangan, strategi bisnis, kebijakan tata kelola, serta capaian keberlanjutan perusahaan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) dan telah diaudit oleh auditor independen untuk menjamin keandalan serta akurasi informasi yang disajikan. Selain laporan keuangan, ANTAM juga menerbitkan *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)* yang terintegrasi dengan laporan tahunan sesuai prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, yang menggambarkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik. Keterbukaan informasi juga dilakukan melalui publikasi rutin di situs web resmi perusahaan, media sosial korporat, dan kanal komunikasi publik lainnya, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses data secara mudah dan transparan. ANTAM turut memastikan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta menyampaikan laporan kepada publik dan regulator apabila terdapat kegiatan material yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Komitmen terhadap transparansi ini diperkuat melalui penerapan *Whistleblowing System (WBS)* yang memungkinkan karyawan maupun pihak eksternal melaporkan dugaan pelanggaran secara anonim dan terlindungi. Dengan langkah-langkah tersebut, ANTAM berhasil membangun budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik, yang menjadi dasar penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan.

2) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) diwujudkan melalui pembagian fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jelas antara organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai dengan sistem *Two-Tier Board* yang menjadi dasar tata kelola korporasi di BUMN. Berdasarkan *Annual Report 2024*, Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi kebijakan strategis, pelaksanaan manajemen risiko, serta kinerja keuangan dan operasional, sedangkan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, implementasi kebijakan, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh RUPS. Untuk memastikan tanggung jawab setiap pejabat korporasi dapat diukur secara objektif, ANTAM menerapkan sistem Key Performance Indicator (KPI) yang menghubungkan kinerja individu dengan tujuan strategis perusahaan. Dewan Komisaris juga didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko dan GCG yang memberikan penilaian independen terhadap efektivitas kebijakan dan pelaksanaan tata kelola. Selain itu, ANTAM memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang beroperasi secara independen dan melapor langsung kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SPI menjalankan audit berbasis risiko untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi operasional perusahaan. Akuntabilitas juga diperkuat melalui mekanisme pelaporan berkala dari Direksi kepada Dewan Komisaris dan RUPS dalam bentuk laporan triwulanan maupun tahunan yang mencakup aspek keuangan, operasional, serta keberlanjutan. Melalui sistem pengawasan berlapis, evaluasi kinerja yang terukur, dan pelaporan yang transparan, ANTAM mampu memastikan bahwa setiap keputusan manajerial dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional, sekaligus memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas perusahaan.

3) Responsibilitas (Tanggung Jawab)

Prinsip responsibilitas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) diwujudkan melalui komitmen perusahaan dalam mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip keberlanjutan yang

RESEARCH ARTICLE

mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance / ESG*). Berdasarkan *Annual Report 2024*, ANTAM menegaskan bahwa setiap kegiatan operasionalnya berpedoman pada prinsip pertambangan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan antara kinerja ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam aspek lingkungan, perusahaan melakukan pengelolaan dan rehabilitasi area tambang secara berkelanjutan, menerapkan efisiensi energi, serta pengurangan emisi karbon di seluruh lini operasional. ANTAM juga menjalankan berbagai program pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya alam untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Di bidang sosial, perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, pendidikan, serta kesehatan di wilayah operasi tambang. Program TJSL ini dijalankan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) dan menjadi bukti konkret peran ANTAM dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari sisi tata kelola, perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, serta prinsip *Good Corporate Governance*. ANTAM juga memperkuat sistem manajemen risiko dan pengendalian internal guna menjamin bahwa keputusan strategis diambil secara hati-hati dan bertanggung jawab. Seluruh bentuk tanggung jawab ini menjadi fondasi penting bagi ANTAM dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta membuktikan komitmen perusahaan untuk menjadi entitas pertambangan yang beretika, berkelanjutan, dan berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.

4) Independensi

Prinsip independensi PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) diterapkan untuk memastikan bahwa setiap organ perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, bebas dari intervensi, serta tidak memiliki benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan *Annual Report 2024*, ANTAM menegaskan pentingnya independensi sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan *Good Corporate Governance*, terutama dalam menjaga integritas proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Struktur tata kelola ANTAM menggunakan sistem *Two-Tier Board* yang memisahkan peran pengawasan oleh Dewan Komisaris dan peran manajerial oleh Direksi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Dewan Komisaris ANTAM terdiri dari tujuh orang anggota dengan tiga di antaranya berstatus komisaris independen, yang proporsinya telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan komisaris independen ini memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, remunerasi, serta penunjukan auditor eksternal, dilakukan secara objektif dan tanpa pengaruh pihak tertentu. Selain itu, Direksi ANTAM diwajibkan menghindari setiap bentuk konflik kepentingan dengan tidak memiliki keterkaitan kepemilikan saham, hubungan keluarga, ataupun hubungan bisnis yang dapat memengaruhi independensi profesional mereka. ANTAM juga menerapkan *Code of Conduct* dan *Conflict of Interest Policy* yang mengatur perilaku etis seluruh insan perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendukung pelaksanaannya, perusahaan menyediakan mekanisme *Whistleblowing System (WBS)* yang memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang secara anonim. Melalui kebijakan dan struktur tersebut, ANTAM berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan, menghindari dominasi oleh pihak manapun, dan memastikan seluruh keputusan bisnis didasarkan pada kepentingan perusahaan serta pemegang saham secara adil dan transparan. Penerapan independensi yang kuat ini menjadi fondasi penting bagi ANTAM dalam menciptakan tata kelola yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi.

5) Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) diterapkan sebagai upaya untuk menjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan memperoleh hak dan perlakuan yang setara sesuai ketentuan hukum dan etika bisnis yang berlaku. Berdasarkan *Annual Report 2024*, ANTAM menegaskan komitmennya untuk memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, dengan memberikan kesempatan yang sama dalam

RESEARCH ARTICLE

memperoleh informasi serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan memastikan keterbukaan akses informasi melalui publikasi laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan paparan publik (*public expose*) yang dapat diakses oleh investor serta masyarakat luas. Dalam hubungan ketenagakerjaan, ANTAM menerapkan prinsip non-diskriminatif dengan menjamin kesetaraan kesempatan kerja tanpa memandang gender, agama, suku, maupun latar belakang sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan melalui penerapan sistem pengupahan yang adil, fasilitas kesejahteraan, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga menjalin hubungan kemitraan yang transparan dan setara dengan pemasok, pelanggan, serta masyarakat sekitar wilayah operasi melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi lokal. ANTAM berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan menghindari praktik monopoli, kolusi, dan korupsi melalui penerapan *Anti-Bribery and Corruption Policy* serta *Gratification Control Program*. Komitmen terhadap keadilan ini diperkuat oleh penerapan *Code of Conduct* yang mengatur perilaku etis seluruh karyawan dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas di tempat kerja. Dengan menjalankan prinsip *fairness* secara konsisten, ANTAM tidak hanya menjaga hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, dan keadilan dalam setiap aspek operasionalnya.

4.1.3 Analisis Efektivitas Penerapan GCG

Evaluasi terhadap efektivitas GCG dilakukan melalui empat komponen utama yang mencerminkan struktur dan mekanisme pengelolaan perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial. Keempat aspek ini dianalisis untuk melihat sejauh mana peran masing-masing elemen berkontribusi dalam menciptakan tata kelola yang efektif, independen, serta selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

1) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) berperan sebagai organ pengawas yang memastikan seluruh kegiatan Direksi dijalankan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan *Annual Report 2024*, Dewan Komisaris berjumlah tujuh orang, dengan tiga di antaranya merupakan Komisaris Independen, yang berarti telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan minimum 30 persen sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proporsi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga objektivitas dan menghindari dominasi pihak tertentu dalam proses pengawasan. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya melalui rapat rutin dan rapat gabungan dengan Direksi, dengan fokus utama pada peninjauan laporan keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Dewan Komisaris juga menilai kinerja Direksi melalui indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator / KPI*) dan memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan efisiensi dan tata kelola perusahaan. Dengan jumlah, proporsi, dan peran aktif yang jelas, Dewan Komisaris ANTAM menunjukkan efektivitas tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan yang transparan dan akuntabel.

2) Dewan Direksi

Dewan Direksi ANTAM memiliki peran sentral dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan secara profesional dan berorientasi pada kinerja. Berdasarkan *Annual Report 2024*, Direksi ANTAM terdiri dari enam anggota, dengan pembagian tugas yang jelas meliputi bidang keuangan, operasional, pengembangan bisnis, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan hubungan eksternal. Pembagian tugas ini memungkinkan Direksi menjalankan fungsi manajerial secara efektif sesuai keahlian masing-masing bidang. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Direksi melaksanakan koordinasi rutin melalui rapat internal dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris guna mengevaluasi pencapaian target strategis serta tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal. Efektivitas kinerja Direksi diukur melalui KPI yang selaras dengan sasaran korporasi dan indikator kinerja keberlanjutan (*sustainability performance indicators*). Direksi juga berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam

RESEARCH ARTICLE

pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan operasional dan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian. Dengan struktur, pembagian peran, dan sistem evaluasi yang jelas, Dewan Direksi ANTAM telah menunjukkan efektivitas tinggi dalam menjaga kinerja bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

3) Komite Audit : Komposisi dan Keahlian

Berdasarkan *Annual Report 2024*, Komite Audit ANTAM berperan sebagai organ vital dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya pada aspek pengendalian internal, kepatuhan, dan pengawasan audit. Sepanjang tahun 2024, komite ini menunjukkan tingkat aktivitas yang sangat tinggi dengan menyelenggarakan 45 kali rapat, yang terdiri dari 25 rapat pleno dan 20 rapat khusus. Tingkat kehadiran seluruh anggota komite mencapai 175.32%, sebuah indikator yang mencerminkan komitmen dan intensitas engagement yang luar biasa dari para anggotanya. Meskipun laporan tahunan ini tidak secara eksplisit memerinci jumlah pasti anggota serta latar belakang pendidikan individual dari setiap anggota Komite Audit, kinerja dan frekuensi rapatnya yang tinggi mengindikasikan bahwa komite ini beranggotakan individu-individu yang memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai di bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen risiko, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Keberadaan dan kinerja komite ini menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan kredibilitas laporan keuangan dan operasional perusahaan.

4) Kepemilikan Manajerial

Mengenai kepemilikan saham oleh jajaran manajemen (Kepemilikan Manajerial), *Annual Report 2024* tidak menyajikan data spesifik yang mengungkap besaran kepemilikan saham perusahaan oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Dokumen tersebut secara komprehensif menguraikan struktur kepemilikan saham mayoritas, yang didominasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan MIND ID, serta komposisi kepemilikan publik yang terbagi dalam kelompok ritel dan institusi. Namun, tidak terdapat bagian yang secara khusus melaporkan kepemilikan portofolio saham ANTAM dari para pimpinan perusahaan. Tidak diaturnya informasi ini dalam laporan dapat mencerminkan suatu kondisi dimana kepemilikan saham oleh internal manajemen memang tidak signifikan, suatu pola yang lazim ditemui pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fenomena ini berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri, sebagaimana diungkapkan dalam teori keagenan, dimana dapat terjadi kesenjangan insentif antara kepentingan manajemen sebagai pelaksana operasional dengan kepentingan pemegang saham mayoritas sebagai prinsipal. Oleh karena itu, dalam konteks ANTAM, motivasi dan pengawasan terhadap kinerja manajemen lebih banyak bergantung pada mekanisme remunerasi, sistem pengendalian internal, dan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris yang independen, daripada melalui penyaluran kepentingan langsung lewat kepemilikan saham.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Cahya (2022), penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT ANTAM menunjukkan bahwa penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi sudah cukup baik secara struktural. Namun, mereka menemukan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat celah dalam pengendalian internal dan pengawasan operasional yang berdampak pada efektivitas penerapan GCG secara substantif. Hal ini sejalan dengan temuan dari Purwanto *et al.* (2025), yang menyatakan bahwa di Indonesia, meskipun perusahaan telah memiliki kerangka dan kebijakan GCG yang lengkap, implementasinya sering kali berhenti pada aspek administratif dan dokumen, tanpa diinternalisasi secara menyeluruh dalam budaya organisasi. Selain itu, penelitian oleh Kompas (2024) menegaskan bahwa kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan pegawai, seperti transaksi di luar mekanisme resmi, menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat operasional masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan GCG tidak hanya bergantung pada kebijakan dan struktur formal, tetapi juga pada budaya etika dan pengawasan yang efektif di tingkat lapangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas GCG, ANTAM perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran etika seluruh pegawai, agar prinsip-prinsip GCG dapat diinternalisasi secara nyata dan berkelanjutan dalam seluruh aktivitas perusahaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021, dapat disimpulkan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas, maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak cenderung semakin rendah. Sementara itu, Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga besar kecilnya leverage belum terbukti secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak pada sampel penelitian ini. Namun, secara simultan, ROE, DAR, dan DER berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,286 menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan tax avoidance adalah sebesar 28,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa profitabilitas, khususnya yang diproksikan dengan ROE, memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan leverage dalam menjelaskan tax avoidance pada perusahaan food and beverage.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk menjaga kinerja profitabilitas dan menerapkan kebijakan perpajakan secara hati-hati, karena kondisi laba yang baik terbukti berkaitan dengan kecenderungan tax avoidance yang lebih rendah. Bagi manajemen, pengelolaan struktur modal tetap perlu diperhatikan, meskipun dalam penelitian ini DAR dan DER belum menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Bagi investor dan pihak eksternal, penilaian terhadap tax avoidance sebaiknya tidak hanya didasarkan pada rasio leverage, tetapi juga perlu mempertimbangkan profitabilitas dan faktor-faktor fundamental lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, sales growth, capital intensity, corporate governance, atau karakter eksekutif agar model penelitian memiliki daya jelas yang lebih kuat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian, menambah periode pengamatan, serta menggunakan proksi tax avoidance yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi dengan lebih baik.

6. Referensi

- Afifah, N., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal terhadap tax avoidance (pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(2).
- Amalia, A. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Repository Institusional Universitas Pelita Harapan*, 6(1).
- Anjani, N., Sutriyono, A. E., & Hasanah, H. (2021). Pengaruh return on equity, debt equity ratio, dan sales growth terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(1), 34-42.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(2), 289–300.
- Estevania, K., & Wi, P. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. *Global Accounting*, 1(3), 113-122.

RESEARCH ARTICLE

- Fitrianingsih, D., Alinda, M. C., & Arum, M. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *SULTAN (Indonesian of Leadership and Management Journal)*, 1(1), 01-13.
- Halim, M. (2021). Pengaruh return on assets (ROA), debt to assets ratio (DAR), dan transfer pricing terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 580-587.
- Karim, K. (2020). The influence of profitability ratio, leverage, and corporate size toward tax avoidance in food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange (Doctoral dissertation). Universitas Pelita Harapan.
- Khatami, K., Susyanti, J., & Khalikussabir, K. (2021). Pengaruh return on asset, return on equity, dan debt to asset ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor food and beverage. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 11(09).
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Marcelia, M. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance (studi empiris perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016) (Doctoral dissertation). Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2018-2020. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(10), 1-12.
- Nisa, S. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan transfer pricing terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017) (Doctoral dissertation). Universitas Mercu Buana.
- Novita Sari, E. L. I. N. A. (2020). Pengaruh return on asset (ROA), capital intensity, sales growth, dan debt to asset ratio (DAR) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 (Doctoral dissertation). Universitas Pancasakti Tegal.
- Oktavia Ningsih, I. N. D. R. I. (2020). Pengaruh TP, DER, size, dan ROA terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018) (Doctoral dissertation). Universitas Mercu Buana Jakarta.
- P, I. M. I., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara mudah memahami metodologi penelitian* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
- Rahmadani, M., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375-392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>.

RESEARCH ARTICLE

Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.

Untara, U., Lestari, T. A., & Sukmarani, W. (2021). Pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (periode 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Kewirausahaan*, 17(02).

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Pengantar akuntansi 2 berbasis IFRS*. Salemba Empat.